

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu dasar dalam berjalannya fungsi pemerintahan terdapat pada rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah dapat direalisasikan dengan menyusun anggaran. Hal ini dikarenakan penyusunan anggaran bertujuan untuk mempermudah anggota organisasi dalam memahami target yang harus dicapai suatu instansi/perusahaan. Penyusunan anggaran juga bertujuan untuk melihat hubungan antara yang satu bagian rencana kerja dengan bagian yang lainnya.

Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis (Tika Sari,2013). Menurut Supriyono (2001) anggaran adalah suatu rencana terperinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu umumnya untuk satu tahun (Irsutami & Wulan, 2014). Jadi, dapat disimpulkan anggaran merupakan rencana kerja organisasi dimasa mendatang, dimana proses penyiapannya disebut penganggaran.(penganggaran hal:3).

Proses penganggaran dimulai dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, serta hak

dan kewajiban yang diberikan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah yang merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban (Pangalila, Elim, & Walandouw, 2017). Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak mengalami kendala-kendala yang mengakibatkan proses penyusunan APBD menjadi terhambat. Seperti keterlambatan suatu instansi dalam menyerahkan rancangan APBD nya. Sehingga dapat menyebabkan suatu daerah mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan proses penganggarannya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh setiap instansi pada suatu daerah agar hal-hal yang dapat menghambat proses penggaran tidak terjadi.

Untuk mewujudkan peran APBD, maka diperlukan penyusunan yang benar dan tepat. Hal ini dikarenakan penyusunan APBD merupakan langkah awal dalam mewujudkan terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Setiap keputusan yang diambil nantinya akan mencerminkan bagaimana suatu kinerja pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berperan dalam menyusun APBD, maka dari itu BPKPD harus memperhatikan setiap proses yang ada dalam penyusunan APBD agar tujuan dalam penyusunan APBD dapat tercapai.

Berkaitan dengan hal yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana mekanisme penyusunan APBD di pemerintah daerah sehingga penulis mengangkat sebuah judul “MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA PARIAMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat adanya permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?
2. Apa saja hambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya hambatan dalam penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk memahami mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.
2. Syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III

Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengalaman mengenai kondisi dunia kerja serta permasalahan yang sering ditemui serta pemecahannya.
2. Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan penulis selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.
4. Membentuk kedisiplinan dan kepribadian bertanggung jawab dalam dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. Menjalin kerja sama serta hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.
2. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal bagi masyarakat luas dan dunia kerja.
3. Mempromosikan Diploma III keuangan yang berkualitas serta siap dan mampu bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Mampu membina kerja sama antara instansi dengan lembaga pendidikan.

2. Memberikan kontribusi langsung terhadap pekerjaan karyawan di instansi tersebut.
3. Memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
4. Menjadi penunjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Saryono (2010), yang berpendapat bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melaksanakan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja dan penulis memperkirakan pelaksanaannya pada bulan Januari hingga Maret 2022.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan bertujuan untuk membatasi segala bentuk permasalahan yang akan dibahas sehingga penulisan ini akan lebih terfokus pada inti

pembahasan dan penulisan ini dapat dimengerti dengan mudah. Ruang lingkup pembahasan penulisan ini yaitu berfokus kepada mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dipaparkan konsep dasar yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. Uraian dimulai dari awal berdirinya, visi misi, struktur instansi, tujuan dan lokasi, serta manfaat instansi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman serta apa saja hambatan dan upaya dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

BAB V PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran.

